

HAKEKAT KARAKTER BANGSA

Secara alamiah, manusia sebagai makhluk sosial sejak dahulu selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, mencari makan, menanggulangi masalah, mengatasi ancaman dan gangguan serta melanjutkan keturunan. Semula kelompok manusia itu hidup berpindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu misalnya, untuk berternak dan bercocok tanam.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dipandang baik untuk sumber penghidupan bagi kelompoknya diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok diberikan kekuatan/kewenangan tertentu dan anggota-anggota kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah dari pimpinannya. Dengan adanya seorang atau beberapa orang dijadikan pemimpin yang mengatur perikehidupan anggota kelompok dan adanya ketaatan anggota kelompok terhadap pimpinannya, maka timbulah dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan” yang sangat sederhana (Kansil dalam Idup dan Sinaga, 2003). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui dan mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak tertulis yang batasan-batasannya tidak jelas dan merupakan adat kebiasaan saja. Lambat laun peraturan itu mereka tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Dengan semakin luasnya kepentingan kelompok-kelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul baik internal maupun eksternal, dirasakan perlu dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itulah yang kemudian dinamakan Negara.

Negara dan Bangsa

Secara etimologi, istilah “negara” muncul dari terjemahan bahasa asing *staat* (Belanda, Jerman) dan *state* (Inggris). Kata *staat* maupun *state* berakar dari bahasa Latin,

yaitu status atau statum, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Dalam hubungan ini selanjutnya Kansil menyatakan bahwa “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep dan pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.A. Logemaan dalam buku *Over de Theorie van Een Stelling Staadrecht*, yaitu bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Pengertian tersebut menempatkan Negara sebagai organisasi kekuasaan (Budiyanto, 1997). Pandangan seperti itu kemudian diikuti oleh Harlord J. Laski, Max Weber, dan Leon Buguis. Dalam pengertian luas, Negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Secara umum kumpulan masyarakat yang membentuk Negara disebut Bangsa. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk “kelompok paguyuban” yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu Negara. Misalnya Negara Republik Indonesia ditakdirkan terdiri atas berbagai suku bangsa. Paling tidak terdapat 300 suku yang menggunakan 200 bahasa yang berbeda (Ainul Yakin, 2005: 4).

Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai istilah bangsa. Mengenai pengertian ada beberapa batasan oleh para pakar (Budiyanto, 1997) seperti di bawah ini:

1. Ernest Rinan (Perancis)

Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.

2. Otto Bauer (Jerman)

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

3. Hans Kohn (Jerman)

Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bias dirumuskan secara eksak. Kebanyakan

bangsa memiliki factor-faktor obyektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya ialah dengan mendirikan negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Faktor obyektif terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita. Fredrich Hertz dari Jerman dalam bukunya *Nationality in History and Politics* mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat) unsur aspirasi, yaitu:

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Misalnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. (dalam Depdagri, 2003: 9)

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (lihat pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Negara sebagai organisasi kekuasaan melindungi segenap bangsanya yang ada di seluruh wilayah/daerahnya, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, agama yang menghuni/bertempat tinggal di seluruh wilayah negara atau tanah air Indonesia. Dalam deklarasi Djoeanda, Laut Indonesia luas 5,8 km², di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih

dari 80.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (Prakoso B.P., 2008: 1).

Bangsa yang tinggal di suatu negara memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain, baik cara bertindak, cara berpikir maupun tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui masyarakatnya atau rakyat bangsanya. Cara-cara tersebut disosialisasikan, dididikkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter suatu bangsa.

Karakter Bangsa

1. Pengertian Karakter

Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “kasairo” berarti “cetak biru”, “format dasar”, “sidik” seperti sidik jari. Dalam hal ini karakter adalah *given* atau sesuatu yang sudah ada dari sananya. Namun, istilah karakter sebenarnya menimbulkan ambiguitas. Tentang ambiguitas terminologi “karakter” ini, Mounier (1956) mengajukan dua cara interpretasi. Ia melihat karakter sebagai dua hal, yaitu pertama sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja dalam diri kita, karakter yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada atau kodrat (*given*). Kedua, karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui mana seorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian ini disebutnya sebagai sebuah proses yang dikehendaki (*willed*).

Tentang karakter seseorang kita hanya bisa menilai apakah seseorang itu memiliki karakter kuat atau lemah. Apakah ia lebih terdominasi pada kondisi-kondisi yang telah ada dari “sana”-nya atau dia menjadi tuan atas kondisi natural yang telah ia terima. Apakah yang *given* itu lebih kuat daripada yang *willed* tadi. Orang yang memiliki karakter kuat adalah mereka yang tidak mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah ada begitu saja dari sononya. Sedangkan, orang yang memiliki karakter lemah adalah orang yang tunduk pada sekumpulan kondisi yang telah diberikan kepadanya tanpa dapat menguasainya. Orang yang berkarakter adalah seperti orang yang membangun dan merancang masa depannya sendiri. Ia tidak mau dikuasai oleh kondisi kodratnya yang menghambat pertumbuhannya. Sebaliknya, ia menguasai, mengembangkannya demi kesempurnaan kemanusiaannya (Doni Kusuma, 2007).

Karakter dapat juga disebut watak, yaitu paduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi “ciri” khusus yang membedakan orang satu dengan yang lain. Karakter atau watak terjadi karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh dari ajar. Oleh sebab itu dinamakan dengan pendidikan karakter. Yang dinamakan “dasar” adalah potensi dasar atau bakat yang diperoleh yang sudah menjadi suatu kodrat. Sedang yang disebut “ajar” adalah segala segala sifat pendidikan dan pengajaran yang dapat mewujudkan *intelligibel*. Menurut Ki Hadjar Dewantara (1977: 408) di dalam jiwa, karakter itu adalah imbalan yang tetap antara hidup batinnya. Seseorang dengan segala macam perbuatannya. Oleh sebab itu, seolah-olah menjadi “lajer” atau “sendi” di dalam hidupnya, yang lalu mewujudkan sifat perangai yang khusus buat satu-satunya manusia.

Karakter dapat dilihat dari tingkah laku ketika orang berinteraksi, yang memiliki arti psikologis dan etis. Dalam arti psikologis, karakter adalah sifat-sifat yang demikian nampak dan yang seolah-olah mewakili pribadinya. Sedangkan dalam arti etis, karakter harus mengenai nilai-nilai yang baik dan menunjukkan sifat-sifat yang selalu dapat dipercaya, sehingga orang berkarakter itu menunjukkan sifat mempunyai pendirian teguh, baik, terpuji dan dapat dipercaya. Berkarakter berarti memiliki prinsip dalam arti moral di mana perbuatannya atau tingkah lakunya dapat dipertanggungjawabkan dan teguh.

2. Karakter Bangsa

Dari uraian tentang karakter dan bangsa di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa karakter bangsa adalah ciri khas dan sikap suatu bangsa yang tercermin pada tingkah laku dan pribadi warga suatu negara. Sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang *given* (yang sudah ada) dan dapat pula karena *willed* (yang diusahakan negara/pemerintah) demi kemajuan bangsanya. Oleh sebab itu, karakter bangsa sangat bergantung pada *political will* pemerintah atau para penguasa suatu negara, sebab karakter bangsa, selain *given* (sudah ada dari awalnya) juga merupakan *willed*, yaitu yang dapat dibangun sesuai dengan visi suatu negara. Sejarah telah membutuhkan bahwa para *founding father* telah meletakkan pondasi dan dasar negara yang menjadi karakter bangsa, yang penting untuk dikembangkan dan ditransformasikan agar menjadi milik seluruh warga bangsa negara Indonesia.

Ada tiga tiang utama jati diri bangsa Indonesia yang tidak boleh digerogeti dengan cara apapun (Hasyim Djalal, 2007: 21), yaitu: *Pertama*, Indonesia sebagai suatu kebangsaan. Hal ini dicapai sejak Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan bahwa Indonesia

adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Dengan demikian, bangsa Indonesia bukanlah berdasarkan suku, agama, rasial ataupun mementingkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi adalah semua warga yang mendiami seluruh tanah air Indonesia. *Kedua*, Indonesia adalah suatu negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Ini berarti bahwa manusia-manusia Indonesia menyatakan dirinya hidup dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu tidak mungkin ada negara lagi di dalam NKRI tersebut. *Ketiga*, Indonesia adalah satu kewilayahan, dalam arti bahwa orang-orang Indonesia yang telah menjadi suatu bangsa itu, berdiam di dalam satu kesatuan kewilayahan, yaitu satu kesatuan nusantara Indonesia yang mencakup wilayah darat, laut, udara, dan kekayaan alam.

Menurut Wibisono (1998: 8) karakter bangsa berisi nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa, warganya harus memiliki apa yang disebut sebagai kesamaan rasa dimiliki dan memiliki (*sense of belonging*) dan mewujudkan suatu derajat nasionalisme. Oleh karena itu, bangsa akan lebih baik bila ditinjau dari fungsi. Artinya setiap warga bangsa harus memiliki kesadaran bersama bahwa mereka membentuk suatu komunitas politik tertentu, di mana kehadiran dan perannya dibutuhkan oleh sesama warga, dan sebaliknya dirinya juga tidak akan mampu menjalankan fungsinya tanpa warga lain. Dapat dikatakan pula bahwa ke dalam dinamika kehidupan bangsa harus terkandung nilai-nilai partisipasi dan akomodasi.

Nasionalisme dapat pula diartikan sebagai ekspresi politik dari kebangsaan, Deutsch (dalam Depdagri, 2003) mengartikan nasionalisme sebagai pilihan kepentingan yang kompetitif dari bangsa yang bersangkutan dengan segenap warganya di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Nasionalisme dapat menjadi faktor penting untuk membangun dan memperkuat rasa kebangsaan (kesadaran nasional). Akan tetapi perlu kehati-hatian, karena nasionalisme yang dipahami dan diterapkan secara berlebihan justru membahayakan bangsa itu sendiri. Hal ini dikarenakan nasionalisme juga memberikan justifikasi intelektual untuk perasaan dendam terhadap bangsa lain. Proses nasionalisme semacam ini dapat berkulminasi pada upaya mendirikan Maha Negara (*empire*) dengan cara memuja dan membanggakan bangsa sendiri sampai ke tingkat merasa ras yang paling unggul yang dikodratkan untuk mengatur dan memerintah bangsa-bangsa lain.

Adapun Kohn (1984) memberi pengertian bahwa nasionalisme adalah suatu “state of mind and an act of consciousness”, jadi sejarah pergerakan nasional harus dianggap sebagai

suatu “history of idea”. Dari pernyataan ini secara sosiologis, ide, pikiran, motif, kesadaran harus selalu dihubungkan dengan lingkungan yang konkrit dari situasi sosio-historis. Pengertian lain dari nasionalisme dapat disebut sebagai “social soul” (K. Lamprecht, 1920), “mental masyarakat” (F. Meineche, 1901), “sejumlah perasaan dan ide-ide yang kabur” (F. Hertz, 1951). Adapun Ernest Gellner (dalam W.G. Suacana, 2006: 16) memberi pengertian nasionalisme sebagai suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang. Tepatnya Gellner lebih menekankan nasionalisme dalam aspek politik. Dikatakannya, jika nasionalisme adalah suatu bentuk munculnya sentimen dan gerakan, baru kita dapat mengerti dengan baik jika kita mendefinisikan apa itu gerakan dan sentimen. Apa yang dimaksudkan sebagai suatu sentimen adalah secara psikologis merupakan suatu bentuk antipati atau ungkapan marah, benci, dan lain sebagainya. Dari penawaran Gellner tersebut mengenai konsep sentimen dan gerakan, nampaknya telah menjadi penekanannya dalam melihat nasionalisme.

Sedang Benedict Anderson (1999) menekankan nasionalisme tidak dalam aspek politik sebagaimana Gellner, tetapi justru tertarik untuk memahami kekuatan dan kontinuitas dari sentimen dan identitas nasional. Ia melontarkan tentang komunitas imajiner masyarakat khayalan (*imagined communities*). Konsep ini menarik karena Anderson, dengan menggunakan pendekatan Durkheimian, mengklaim bahwa nasionalis berakar dari sistem budaya dalam bentuk kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa dikonstruksikan melalui khayalan yang menjadi materi dasar nasionalisme.

Meskipun berbeda perspektif, akan tetapi keduanya menekankan bahwa bangsa (*nation*) adalah suatu konstruksi ideologi yang nampak sebagai bentuk garis antara definisi diri) kelompok budaya dan *state* (negara), dan mereka membentuk komunitas abstrak berdasarkan perbedaan dari negara dinasti atau komunitas berdasarkan kekerabatan yang mendahului pembentukan mereka.

Dari berbagai pengertian di atas tidak terdapat perbedaan yang mendasar, justru menunjukkan persamaan, yaitu semuanya lebih bersifat sosio-psikologis. Ini berarti nasionalisme sebagai bentuk respon yang bersifat sosio-psikologis tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi lahir dari suatu respon secara psikologis, politis, dan ideologis terhadap peristiwa yang mendahuluinya, yaitu imperialis (kolonialisme). Jika demikian halnya, maka awal terbentuknya nasionalisme lebih bersifat subyektif, karena lebih

merupakan reaksi “group consciousness”, “we sentimen”, “corporate will”, dan berbagai fakta mental lainnya.

Secara analitis, nasionalisme mempunyai tiga aspek yang dapat dibedakan, yaitu:

1. Aspek kognitif, yaitu menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena, dalam hal ini adalah pengetahuan akan situasi kolonial pada segala porsinya.
2. Aspek *goal/value orientation*, yaitu menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelakunya, dalam hal ini yang dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme.
3. Aspek afektif dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya. Misalnya berbagai macam diskriminasi pada masyarakat kolonial melahirkan aspek afektif tersebut.

Pengertian nasionalisme dengan demikian tidaklah kaku dan sempit, artinya hanya ada bila suatu negara mengalami kolonisasi fisik dari negara asing. Nasionalisme selalu hadir sepanjang sejarah kebangsaan dengan corak dan dimensi berbeda. Ia bukanlah sebuah produk akhir, tetapi sebuah proses. Secara sosiologis, nasionalisme adalah *situations gebunden*, terikat dalam situasi, berkembang dengan berkembangnya keadaan sehingga nasionalisme akan muncul dalam perwujudan yang berbeda.

Nasionalisme selalu menyertai konsep pembangunan bangsa (*national building*). Sasaran nasionalisme itu sendiri adalah lebih sekedar perluasan dan penyebaran kesadaran berbangsa atau terbentuknya suatu negara bangsa. Pembangunan bangsa adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latar belakang etnik, ras dan agama ataupun budaya, namun mereka adalah satu bangsa. Jadi antara nasionalisme, *national building* dan *nation state* merupakan wujud dari nasionalisme *in action*.

Perspektif masa depan membuat suatu negara dan bangsa bergulat untuk mengatasi karakter yang *given* atau stereotipe-stereotipe yang selama ini sudah diimejkan pada mereka; misalnya bangsa Indonesia pemalas, sulit maju dan kurang cerdas, bangsa Indonesia bangsa yang konsumtif dan bukan produktif, dan sebagainya. Karakter bangsa yang mengarah ke masa depan dapat mendorong bangsa untuk berjuang keras menjadi sosok yang mampu

menyempurnakan diri terus menerus, menyempurnakan diri dalam ruang dan waktu sehingga masa depan menjadi milik setiap anak bangsa. Artinya masa depan suatu bangsa yang berwawasan ke depan senantiasa menawarkan kemungkinan dan pertumbuhan yang lebih maju dan sempurna. Bangsa memang tidak akan dapat melepaskan diri dari sejarah masa lalu yang telah menjadi bagian integral dari proses pertumbuhannya. Namun, bangsa tidak hanya berhenti di masa lalu. Manusia-manusia yang ada dalam satuan bangsa dianugerahi kemampuan untuk mengarahkan dirinya ke depan, menuju hari depan yang lebih baik. Karena karakter bangsa selain *given*, dia juga *willed* yang menuntut bangsa itu bangun untuk menyempurnakan hidupnya agar dapat sejajar ataupun terkemuka dalam urusan bangsa-bangsa maju. Hal inilah yang diharapkan bangsa Indonesia pada masa depan, agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan ikut memimpin dunia, namun tetap memegang teguh jati diri bangsa. Bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang memiliki *high trust society* yang menjadi modal sosial (*social capital*) bangsa tersebut. Bangsa yang memiliki *high trust society* adalah bangsa yang masyarakatnya memiliki karakter dan dapat dipercaya, di mana nilai-nilai integritas, kerja sama, tenggang rasa, etos kerja yang tinggi dan amanah, jujur serta memiliki tanggung jawab menjadi corak kehidupan masyarakatnya.

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki nilai kebangsaan. Parangtopo (dalam Idup S. dan Sinaga, 2003) memberi pengertian nilai kebangsaan sebagai “tindak tanduk suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterkaitan sosiokultural yang disepakati bersama. Bintoro (1996) mengatakan negara Indonesia adalah negara kebangsaan yaitu suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun dan diperasikan berdasarkan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu timbul, berkembang, dan beroperasi berdasarkan persetujuan terus menerus dari unsur-unsur komunitas politik itu. Wawasan kebangsaan mengandung arti sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosio budaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Dalam wawasan kebangsaan terkandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsanya. Selain itu wawasan kebangsaan

menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan mendatang serta berbagai potensi bangsanya.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
3. Cinta akan tanah air dan bangsa;
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. Kesetiakawanan sosial;
6. Masyarakat adil dan makmur (Idup S. dan Sinaga, 2003)

Wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan bangsa dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa.

“Cinta akan tanah air dan bangsa” menegaskan nilai sosial dasar. Dengan ini wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi sesamanya, tanpa membeda-bedakan

suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

Paham kebangsaan dan esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan, yang dijalankan dengan prinsip demokrasi.

Adapun kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tercapainya kesejahteraan umum, yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam kehidupan sosial, yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga, dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara penuh dan dengan lebih mudah. Kebangsaan dan demokrasi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*).

Hal yang sama juga nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Hal ini sudah dijamin dalam undang-undang dasar.

Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokratis dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh

mematikan keanekaragaman dan kemajemukan. Sebaliknya keanekaragaman dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan.

Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Misi yang diamanatkan ialah agar para warga negara Indonesia membina dengan jiwa besar dengan setia terhadap tanah air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta tanah air dan bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antarras, antarbangsa, dan antarnegara.

Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia pada hakekatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Untuk dapat memahami hakekat wawasan kebangsaan Indonesia perlu kiranya dipahami tentang jati diri bangsa kita dan untuk itu perlu pula dipahami pandangan dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, karena hal tersebut yang melandasi karakter bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ainul Yakin. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Mulya.
- Anderson, Benedict. 1999. *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Omi Intan Naomi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Insist.
- Budiyanto. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. LAN.
- Departemen Dalam Negeri. 2003. Sosialisasi Kebangsaan. *Modul 8*. Depdagri Dirjen Kesatuan Bangsa.
- Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter*. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Hasyim Djalal. 2007. Jatidiri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi. *Pokok-Pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*. Surabaya.
- Idup Suhadi, dan AM. Sinaga. 2003. Wawasan Kesatuan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Kohn, Hans. 1984. *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Sumantri Mertodipuro (penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Mounier, Emmanuel. 1956. *The Character of Man*. Translate Into English by Cynthia Rowland. New York: Harper dan Brothers.

Prakoso Bhairawa Putra. 2008. Strategi Pemeliharaan Batas Wilayah Melalui Penguatan Pengelolaan Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil Terluar. *Inovasi Online*, vol. 12/xx/Nov2008. <http://c.c.msnsnscache.com/cache.aspx?q>.

Wayan Gede Suacana. 2006. Etno-Nasionalisme dan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Sosial Politik Sarathi*, vol. 13. Denpasar.